BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari pemberitaan TVOne dan MetroTV tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, peneliti mengambil tema '*pelaporan kasus*' pada pemberitaan bulan Oktober dan '*pelaporan Buni Yani*' pada bulan November dengan hasil data berikut.

1. Pemberitaan TVOne

a. Tema *Pelaporan Kasus* (OT_1)

Tema pertama pada TVOne memiliki judul '*Geger Pernyataan Ahok*' dengan subjudul '*Ahok dinilai menyinggung umat islam*' (OSJ_1.1) dan '*hindari isu SARA dalam pilkada*' (OSJ_1.2). Isi pemberitaan pada tema pertama (OI_1) ini adalah '*Basuki Tjahja Purnama dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Pernyataan Ahok dinilai telah menyinggung umat islam.*'

Tema pertama TVOne menampilkan empat narasumber sebagai penguat dari beritanya. Narasumber pertama (ORV_1.1) Syamsul Holal Chaniago (ketua Forum Anti Penistaan Agama) "*memprotes keras pernyataan perkataan Basuki Tjahja Purnama yang meng e dan ternyata bahwa adanya penistaan agama ini yang mengatakan bahwa surat Al-maidah itu adalah kebohongan pada umat islam. Jadi sebagai umat islam kami sangat memprotes hal tersebut. Ini adalah menghina sebagai umat*

islam yang melecehkan Alquran sebagai kitab suci umat islam.”

Narasumber kedua (ORV_1.2) Irjen Polisi Boy Rafli Amar (Kadip Humas Mabes Polri) *“Iya kalau gitu merujuk pada apa yang disampaikan pak Kaba, seperti biasanya ada langkah-langkah penyelidikan terkait setiap laporan yang masuk. Ya, itu prosedur. Setiap laporan diterima ada langkah-langkah penyelidikan untuk dilihat. Berkaitan dengan e.. adanya bukti-bukti yang cukup atau tidak berkaitan persangkaan yang dilaporkan, itu saja dulu, kalau udah gitu terima laporannya.”*

Narasumber ketiga (ORV_1.3) Muhammad Nur Khoiron (anggota komnas HAM) *“Kalau memang Ahok itu yang diucapkan ada unsur tidak sengaja atau sengaja itu memang pernyataan yang salah ya harus minta maaf gitu. Artinya ada dimensi di dalam e perkataan Ahok itu yang karena dia tidak tahu dan dia bukan kelompok orang islam atau muslim, mengutip ayat yang kliru kan e untuk sebagian orang itu dianggap sensitif, tapi bagi saya itu lucu gitu. Jadi minta maaf sajalah dan saya berharap juga publik tidak perlu membesar-besarkan karena situasi ini adalah dalam rangka ataumenjelang pilkada. Sebaiknya isu agama yang e sekarang muncul seperti ini tidak perlu dipertanyakan.”*

Narasumber keempat (ORV_1.4) Helmi Faisal (Sekjen PBNU) *“Seharusnya pak Ahok menggunakan diksi yang lain, yang lebih clear, yang lebih aman, dan tidak menimbulkan polemik kontroversi. Karena kalimat ini kalau dipahami secara telanjang itu pasti akan menyinggung banyak orang. Kita akan mempelajari klarifikasi ataupun tabayun dari pak Ahok seperti apa.”*

Reaksi yang diberikan narasumber pada tema pertama didukung dengan komentar presenter. Ada tiga komentar presenter pada tema ini. Komentar presenter yang pertama (OKP_1.1) *Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Anti Penistaan Agama, jumat siang mendatangi sentra pelayanan kepolisian Polda Metro Jaya untuk melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Terkait pernyataannya yang diduga melakukan penistaan agama. Laporan tersebut berawal dari banyaknya pemberitaan di media massa yang memuat konten dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok saat menghadiri pertemuan dengan warga di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Forum Anti Penistaan Agama menilai, apa yang dilakukan Ahok sudah menciderai rasa keadilan dan merupakan pelanggaran serius.* Komentar presenter yang kedua (OKP_1.2) *Sementara itu Kadip Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan bahwa Badan Reserse Kriminal Polri juga sebelumnya telah menerima surat laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Surat laporan tersebut diserahkan anggota DPRD DKI Jakarta Fajar Sidiq kemarin. Namun surat tersebut ditolak karena tidak adanya fatwa majelis ulama Indonesia.* Komentar presenter yang ketiga (OKP_1.3) *Anggota komnas HAM M. Nur Khoiron meminta masyarakat tidak membesar-besarkan pernyataan Ahok, apalagi dikaitkan dengan pilkada Jakarta yang akan segera berlangsung. Sementara pengurus besar Nahdlotul Ulama/ PBNU akan mendengarkan Ahok terkait pernyataannya.*

b. Tema *Pelaporan Buni Yani* (OT_2)

Tema kedua pada TVOne memiliki judul '*Buni Yani Ditetapkan sebagai Tersangka*' dengan subjudul '*Tetapkan Buni jadi Tersangka*' (OSJ_2.1) dan '*Polisi Miliki 4 Bukti untuk Tetapkan Buni jadi Tersangka*' (OSJ_2.2). Isi pemberitaan pada tema kedua (OI_2) ini adalah *Polisi menetapkan Buni Yani yang mengunggah video Ahok sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan.*

Tema kedua TVOne menampilkan dua narasumber sebagai penguat dari beritanya. Narasumber pertama (ORV_2.1) Kombes Awi Setiyono "*Kita sudah memeriksa dari 5 alat bukti sudah memenuhi 4 alat bukti mulai dari: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; dan terakhir petunjuk. Itu sudah kita kantong. Kita naikkan saksi sebagai tersangka karena memang unsur-unsurnya sudah terpenuhi, untuk bukti yang seperti itu sudah terpenuhi.*" Narasumber kedua (ORV_2.2) Buni Yani "*Ketika terjadi diskusi, lalu kemudian menemukan ada satu kata yang hilang yaitu kata 'pakai' dalam transkrip saya. 'dibohongi pakai surat Almaidah' seharusnya, tapi dalam transkrip saya itu tidak ada kata pakainya. Ketika saya dengar ada kata 'pakai' dalam videonya, langsung saya bilang langsung saya mengaku 'betul'. Itu memang ada kata 'pakai' saya minta maaf, saya gak berani, saya minta maaf. sekali saya berbohong, orang tidak akan percaya saya seterusnya, makanya langsung saya bilang itu.*"

Reaksi yang diberikan narasumber pada tema kedua didukung dengan komentar presenter. Ada tiga komentar presenter pada tema ini.

Komentar presenter yang pertama (OKP_2.1) *Setelah sempat menjalani pemeriksaan sebagai terlapor kurang lebih sembilan jam, polisi langsung menetapkan Buni Yani yang mengunggah video Ahok ke media sosial sebagai tersangka dalam kasus penghasutan isu sara. Polisi mengatakan, penetapan Buni didasari atas empat alat bukti yang sudah dimiliki;* komentar narasumber yang kedua (OKP_2.2) *Buni Yani yang sebelumnya dilaporkan oleh komunitas muda Advokad Ahok-Jarot dengan tuduhan sengaja menambahkan kalimat provokatif dalam video pidato Ahok di Kepulauan Seribu dan mengunggah ke akun media sosial facebook. Dalam laporannya, mereka menuding Buni sengaja mentranskrip tidak lengkap pada rekaman video tersebut. Dalam sebuah kesempatan, Buni mengaku memang tidak menulis lengkap pada transkripnya. Namun, menurutnya makna yang terkandung dalam video tersebut tetap sama;* dan komentar presenter yang ketiga (OKP_2.3) *Polisi terus memeriksa kasus Buni sebagai tersangka. Kasus hukum yang telah berjalan, kini menjadi sorotan publik.*

2. Pemberitaan MetroTV

a. Tema Pelaporan Kasus (MT_1)

Tema pertama pada MetroTV memiliki judul *Isu Penistaan Kitab Suci* dengan subjudul *Dituding Menistakan Agama* (MSJ_1.1) dan *Salah Presepsi karena Video Dipotong* (MSJ_1.2). Isi berita pada tema pertama (MI_1) adalah *Gubernur Basuki Cahya Purnama membantah menistakan kitab suci Alquran. Ahok menilai ada salah presepsi karena video yang*

beredar sudah dipotong. Bantahan ini menanggapi laporan pemuda Forum Anti Penistaan Agama ke polisi.

Tema pertama MetroTV menampilkan dua narasumber sebagai penguat dari beritanya. Narasumber pertama (MRV_1.1) Nusron Wahid (politisi Golkar) *“Fakta yang jelas, konteksnya juga jelas. Tidak ada sekatapun maupun e potongan katapun di situ yang mengatakan Ahok menistakan ataupun melecehkan Alquran itu tidak ada. Justru yang perlu kita cari adalah siapa orang yang sengaja memanggil dan kemudian mendiskripsikan itu. Yang perlu kita cari ini cara-cara yang tidak akhlaqul karimah, cara-cara yang tidak islami, dan cara-cara yang sengaja menggunakan ayat Alquran untuk menjatuhkan itu.”* Dan narasumber kedua (MRV_1.2) adalah Ahok *“Saya mengatakan dari tahun 2003 berpolitik, saya menemukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak milih saya. Jadi ayat Alquran ada yang salah gak? Gak salah. Konteksnya bukan itu. Konteksnya jangan pilih Nasrani Yahudi jadi temenmu sahabatmu diterjemahkan asli jadi bilang saya menyampuri urusan agama. Saya sekolah islam SD SMP 9 tahun. Jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci dalam Alquran tidak maksudnya seperti itu, diplesetkan seperti itu.”*

Reaksi yang diberikan narasumber pada tema pertama didukung dengan komentar presenter. Ada dua komentar presenter pada tema ini. Komentar presenter yang pertama (MKP_1.1) *Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Anti Penistaan Agama melaporkan Gubernur*

DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok ke Polda Metro Jaya. Ahok dituding menistakan agama karena komentarnya mengenai surat Al-Maidah. Menanggapi laporan tersebut, politisi partai Golkar Nusron Wahid menyatakan video pernyataan Ahok yang beredar sengaja dipotong, sehingga memunculkan salah pengertian di masyarakat. Komentar narasumber yang kedua (MKP_1.2) Video pernyataan Ahok yang dilontarkan saat mengunjungi kepulauan Seribu telah diunggah secara utuh ke situs berbagi youtube. Ahok mempersilahkan semua pihak melihat secara utuh agar tidak salah persepsi.

b. Tema Pelaporan Buni Yani (MT_2)

Tema kedua pada MetroTV memiliki judul Dugaan Provokasi di Media Massa dengan subjudul pertama (MSJ_2.1) Polisi Telusuri Dugaan Pelanggaran Hukum Buni; subjudul kedua (MSJ_2.2) Dugaan Provokasi di Media Sosial; subjudul ketiga (MSJ_2.3) Buni Upload Video Sesuai dengan Sebelumnya; dan subjudul keempat (MSJ_2.4) Proses Hukum Buni Yani. Isi berita pada tema kedua (MI_2) adalah Polisi mendalami dugaan hukum Buni Yani pengunggah video Ahok. Video hasil editan tsb kemudian memicu kontroversi di tengah masyarakat. Buni Yani membantah telah mengedit video tersebut, namun mengakui mengupload ke sosial media.

Tema kedua MetroTV menampilkan dua narasumber sebagai penguat dari beritanya. Narasumber pertama (MRV_2.1) adalah Boy Rafli Amar “Dengan upload yang dilakukan dan penyebarluaskan bahwa di sosial media kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang viral dan kemudian

menjadi bahan publik, kita hanya ingin melihat apakah disitu ada pelanggaran hukum atau tidak, itu saja oleh penyelidikny kita tidak mau kemana-mana.” Narasumber kedua (MRV_2.2) adalah Buni *“Saya bersumpah demi Allah tidak mengubah apa2 di dalam video tersebut, sama sekali tidak karena pa, karena saya tahu itu adalah fitnah, saya membaca undang2 ITE, saya membaca undang2 pers, saya membaca undang2 tentang penyiaran.”* dan narasumber ketiga (MRV_2.3) adalah Taufiqulhadi (anggota komisi II DPR) *“Jika mau melakukan penegakan hukum, menerapkan hukum, ya Terhadap seseorang maka apabila terkait dengan orang lain, orang lain itu harus diperlakukan sama juga. Ya semuanya, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya menurut saya, karena itu adalah siapapun yang terkait dengan itu, menurut saya harus diproses dilihat, karena itu saling terkait nantinya karena kalau tidak, tidak kita temukan e keadilan karena kenapa ada mata rantai yang terputus.”*

Reaksi yang diberikan narasumber pada tema pertama didukung dengan komentar presenter. Ada empat komentar presenter pada tema ini. Komentar presenter yang pertama (MKP_2.1) *Buni Yani, pengunggah cuplikan video dugaan penistaan agama oleh calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan segera diperiksa polisi. Meski Buni Yani telah mengaku sebagai pengupload video tersebut, namun polisi menganggap Buni sebagai salah satu pemicu kontroversi di tengah masyarakat yang yang berujung demonstrasi 4 nov lalu. Menurut kepala divisi humas mabes polri irjen boy rafli amar, buni yani berpotensi*

menjadi tersangka karena video unggahannya di media sosial dan memicu kegaduhan di publik; komentar presenter yang kedua (MKP_2.2) Atas tuduhan tersebut, buni yani membantah apa yang disudutkan padanya terkait videop yang tersebar di media sosial, Buni hanya mengupload video yang sudah diupload sebelumnya oleh akun yang bernama NKRI. Apa yang dituliskan Buni dalam akun sosial media facebook sama dengan apa yang telah disampaikan Ahok saat berkunjung di kepulauan seribu; komentar presenter yang ketiga (MKP_2.3) Dukungan untuk memproses hukum buni Yani juga muncul di dunia maya, petisi daring yang diinisiasi paguyuban diskusi di situs change..org hingga senin 7 nov telah ditanda tangani lebih dari 130 ribu netizen, atas kasus ini buni yani yang terancam dikenakan UU ITE pasal 28 dan pasal 45 ayat 2 dengan ancamanpidamna paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 milyar rupiah; dan komentar presenter yang keempat (MKP_2.4) Anggota komisi 3 DPR Taufiqul Hadi menyatakan polisi harus mengusut unsur pidana pada kasus Buni Yani. Menurut Taufiq sangkaan penodaan agama atas Ahok berkaitan dengan transkrip Buni Yani yang menghilangkan kata “pakai” dalam video rekaman Ahok yang ia unggah di media sosial.

B. PEMBAHASAN

Hasil temuan-temuan pada pemberitaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama di TVOne dan MetroTV berdasarkan teori Analisi Wacana Kritis yang digunakan. Fokus masalah akan terjawab berdasarkan data yang ditemukan. Data yang telah ditemukan pada pemberitaan tersebut berupa pola pemberitaan pada TVOne dan Metro TV serta strategi wacana yang

digunakan oleh TVOne dan MetroTV dengan pengambilan data dari beberapa tema pemberitaan yang sama. Dengan demikian, fokus masalah yang akan terjawab adalah: 1.) pola pemberitaan yang digunakan oleh TVOne dan Metro TV dalam pemberitaan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama; dan 2.) strategi wacana yang digunakan oleh TVOne dan Metro TV dalam pemberitaan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama. Adapun data yang telah diperoleh akan dijabarkan dan kemudian akan dibandingkan sebagai berikut.

1. Pola Pemberitaan

Berita mempunyai pola struktur wacana tersendiri meliputi *summary* (ringkasan berita); reaksi dalam berita; dan komentar presenter yang mendukung berita yang berbeda dengan wacana-wacana yang lain (Van Dijk, 1988:52). Struktur wacana berita berupa susunan mengenai cara teks tersebut dibangun. Setiap stasiun televisi mempunyai pola pemberitaan yang masing-masing untuk menyampaikan informasi sesuai dengan visi misi dari stasiun tersebut.

1.) Pelaporan kasus penistaan agama

Merupakan tema salah satu pemberitaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama tertanggal 8 Oktober 2016. Dalam tema ini, kasus yang menyeret Gubernur DKI tersebut dilaporkan ke pihak berwajib.

a. Pola Pemberitaan TVOne

Tanggal 8 Oktober 2016 berita terkini TVOne memberitakan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan mengambil tema (OT_1) '*Pelaporan kasus penistaan agama*'. Pola

pemberitaan yang pertama yakni *summary* (ringkasan) yang terdiri dari judul dan subjudul yang saling berkaitan (Van Dijk, 1988:52). OT_1 diwakili dengan judul '*Geger Pernyataan Ahok*'. Judul tersebut mempunyai dua subjudul yang keduanya saling berhubungan dalam sebuah berita. Subjudul yang pertama (OSJ_1.1) '*Ahok dinilai menyinggung umat Islam*' nampaknya dapat mewakili apa yang tersirat dalam judul yakni pernyataan Ahok yang telah menyinggung umat Islam tersebut yang membuat geger. Subjudul yang kedua (OSJ_1.2) yakni '*Hindari Isu Sara dalam Pilkada*' yang merupakan penjelas dari berita-berita yang disampaikan sebelumnya dan juga merupakan ringkasan yang disampaikan pada akhir pemberitaan. Dari tema, judul, sampai dengan subjudul yang dipakai untuk menarik pemirsa pada pemberitaan saling berkaitan satu sama lain.

Pola pemberitaan berikutnya terlihat pada isi berita. Katagori berita yang terdapat pada isi pemberitaan pertama adalah peristiwa utama yang mengandung informasi utama sehubungan dengan topik yaitu situasi aktual dan peristiwa konkret (Van Dijk, 1988:70). Isi pemberitaan TVOne pada OT_1 ini adalah OI_1 yakni "*Basuki Tjahja Purnama dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Pernyataan Ahok dinilai telah menyinggung umat islam.*" Hal ini menunjukkan bahwa Basuki Tjahja Purnama dilaporkan ke polisi atas atas pernyataannya yang menyinggung umat Islam sehingga menimbulkan dugaan penistaan agama. Pernyataan pada OI_1 merupakan pokok penyampaian dari judul yang digunakan oleh TVOne. Kalimat terakhir pada OI_1 inilah yang nampaknya menjadi penekanan untuk dijadikan judul.

Pada pola pemberitaan berikutnya nampak pada reaksi verbal narasumber yang merupakan sebuah katagori skema berita yang bersifat lebih khusus yang mungkin tampak sebagai *consequense* (Van Dijk, 1988:60). Peristiwa berita yang paling penting biasanya diikuti oleh reaksi verbal partisipan/ aktor yang penting. Narasumber pertama yang ditampilkan TVOne sebagai pendukung dari pernyataan-pernyataannya pada pemberitaan kasus ini (ORV_1.1) yakni Syamsul Holal Chaniago (ketua Forum Anti Penistaan Agama). Ia menyatakan *“Memprotes keras pernyataan perkataan Basuki Tjahja Purnama yang meng e dan ternyata bahwa adanya penistaan agama ini yang mengatakan bahwa surat Al-maidah itu adalah kebohongan pada umat islam. Jadi sebagai umat islamkami sangat memprotes hal tersebut. Ini adalah menghina sebagai umat islam yang melecehkan Alquran sebagai kitab suci umat islam.”* Pernyataan tersebut tekah menunjukkan bahwa ada penistaan agama dalam pernyataan Basuki Tjahja Purnamayang bahwa surat Al-Maidah itu adalah kebohongan pada umat islam. Menurutnya ini adalah penghinaan terhadap umat Ialam dan pelecehan terhadap Alquran. Pemberitaan tentang kasus Ahok ini melibatkan Forum Anti Penistaan Agama. Forum Anti Penistaan Agama sendiri adalah sebuah kelompok masyarakat yang aktif mengkritisi persoalan ini. Karena itu, sejalan dengan dimensi kewacanaan Fairclough (Eriyanto, 2001: 291) TVOne nampaknya memanfaatkan kelompok ini untuk memberikan pernyataan yang tentunya berupa ketidaksetujuan terhadap kasus dalam pemberitaan ini dengan pernyataan-pernyataan yang diutarakannya.

Narasumber yang kedua ORV_1.2 yakni Irjen Polisi Boy Rafli Amar (Kadip Humas Mabes Polri). Beliau menyatakan *“Iya, kalau gitu merujuk pada apa yang disampaikan pak Kaba, seperti biasanya ada langkah-langkah penyelidikan terkait setiap laporan yang masuk. Ya, itu prosedur. Setiap laporan diterima ada langkah-langkah penyelidikan untuk dilihat. Berkaitan dengan e.. adanya bukti-bukti yang cukup atau tidak berkaitan persangkaan yang dilaporkan, itu saja dulu, kalau udah gitu terima laporannya.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akan ada langkah-langkah penyelidikan terkait setiap laporan yang masuk. Pernyataan tersebut menanggapi apa yang dilakukan oleh Forum Anti Penistaan Agama sebagai pelapor kasus Ahok. Pernyataan Kadip Humas Mabes Polri tersebut juga merupakan titik tengah dari apa yang terjadi pada kasus tersebut sesuai dengan dimensi kewacanaan Fairclough (Eriyanto, 2001: 291). Bahwasanya jika pelaporan yang sudah dilakukan oleh Forum Anti Penistaan Agama ada bukti yang bisa menguatkan, maka laporan tersebut akan segera diproses.

ORV_1.3 berikutnya adalah Muhammad Nur Khoiron (anggota komnas HAM). Ia menyatakan *“Kalau memang Ahok itu yang diucapkan ada unsur tidak sengaja atau sengaja itu memang pernyataan yang salah ya harus minta maaf gitu. Artinya ada dimensi di dalam e perkataan Ahok itu yang karena dia tidak tahu dan dia bukan kelompok orang islam atau muslim, mengutip ayat yang kliru kan e untuk sebagian orang itu dianggap sensitif, tapi bagi saya itu lucu gitu. Jadi minta maaf sajalah dan saya berharap juga publik tidak perlu membesar-besarkan karena situasi ini adalah dalam rangka ataumenjelang pilkada. Sebaiknya isu agama yang e sekarang muncul seperti ini tidak perlu*

dipertanyakan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada dimensi yang tidak sengaja atau memang salah pada ucapan Ahok, sehingga dianggap keliru bagi sebagian orang yang sensitif. Jadi sebaiknya Ahok meminta maaf. Dia juga berharap masyarakat tidak perlu membesar-besarkan karena situasinya menjelang pilkada. Pernyataan ORV_1.3 tersebut merupakan solusi dari masalah yang diberitakan yakni pernyataannya Ahok sesuai dengan dimensi kewacanaan Fairclough (Eriyanto, 2001: 291). Pernyataannya tidak memihak pada pelapor maupun terlapor, karena solusi dan harapan disampaikan olehnya pada kutipan *“Jadi minta maaf sajalah dan saya berharap juga publik tidak perlu membesar-besarkan karena situasi ini adalah dalam rangka atau menjelang pilkada.”*

Narasumber yang terakhir (ORV_1.4) sebagai penguat dari isi pemberitaan yang ingin disampaikan adalah Helmi Faisal (Sekjen PBNU). Beliau menyatakan *“Seharusnya pak Ahok menggunakan diksi yang lain, yang lebih clear, yang lebih aman, dan tidak menimbulkan polemik kontroversi. Karena kalimat ini kalau dipahami secara telanjang itu pasti akan menyinggung banyak orang. Kita akan mempelajari klarifikasi ataupun tabayun dari pak Ahok seperti apa.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Seharusnya Ahok menggunakan diksi yang lain sehingga tidak menimbulkan polemik kontroversi. Karena kalimat Ahok jika dipahami secara telanjang itu pasti akan menyinggung banyak orang. Sehingga perlu adanya klarifikasi dari Ahok itu sendiri. Sekjen PBNU adalah tokoh masyarakat yang berwibawa di kalangan umat islam. Karena kasus tersebut menyangkut umat islam, maka Sekjen PBNU memberikan saran dan masukan bagi Ahok agar lebih berhati-

hati dalam memilih kata ketika berpidato. Di akhir kalimat, beliau menyatakan “*Kita akan mempelajari klarifikasi ataupun tabayun dari pak Ahok seperti apa.*” Jadi, sesuai dengan dimensi kewacanaan Fairclough (Eriyanto, 2001: 291) sehingga nampak dari kalimat tersebut bahwa sekjen PBNU akan menelaah lebih lanjut kasus yang dilaporkan tersebut agar tidak muncul spekulasi-spekulasi bervariasi di masyarakat, serta mengharapkan masyarakat untuk dapat berfikir jernih akan kasus pemberitaan tersebut.

Beberapa narasumber yang terdapat pada pemberitaan TVOne untuk OT_1 ini tertata rapi. TVOne telah menghadirkan narasumber sesuai dengan kriteria yakni narasumber yang kredibel dan merupakan orang nomor satu pada bidangnya serta menguasai segala bentuk legitimasi dalam sebuah kasus (Badara, 2012: 51). TVOne nampaknya ingin menghadirkan orang-orang yang berpihak pada pelapor. Pemberitaan TVOne untuk kasus ini ingin menghadirkan kebenaran pada pelapor. Masyarakat dibentuk untuk sependapat dan membenarkan pelapor, karena beberapa narasumber yang ditampilkan adalah orang-orang yang sepaham dengan pelapor mulai dari ketua Forum Anti Penistaan Agama. Pada pemberitaan ini yang melaporkan adalah dari pihak forum anti penistaan agama, maka yang pertama kali dimunculkan adalah ketua Forum Anti Penistaan Agama dengan alasannya yang membenarkan kasus ini. Selanjutnya ditanggapi oleh Kadip Humas Mabes Polri yang merupakan penampung laporan kasus dari forum anti penistaan. Berikutnya yakni anggota komnas HAM yang menjadi penetral dari kasus ini. Dan terakhir yakni Sekjen PBNU yang memberikan segala masukan untuk kasus ini baik bagi pelapor maupun bagi terlapor.

Kategori pola pemberitaan terakhir adalah *comment* yang memuat komentar, opini dan evaluasi wartawan atau media bersangkutan. Meskipun setiap penulis berita menyadari bahwa fakta dan opini tidak boleh tercampur di dalam berita, kategori *comment* sering muncul dalam berita (terkadang) secara tidak langsung (Van Dijk, 1988:67). TVOne ingin menghadirkan ideologi profesional/ objektivitas yang merupakan standart profesional berhubungan dengan jaminan yang ditekankan pada khalayak bahwa yang ditekankan adalah suatu kebenaran (Bungin, 2008: 199). Komentar presenter di awal pembuka berita (OKP_1.1) yakni *“Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Anti Penistaan Agama, jumat siang mendatangi sentra pelayanan kepolisian Polda Metro Jaya untuk melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Terkait pernyataannya yang diduga melakukan penistaan agama. Laporan tersebut berawal dari banyaknya pemberitaan di media massa yang memuat konten dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok saat menghadiri pertemuan dengan warga di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Forum Anti Penistaan Agama menilai, apa yang dilakukan Ahok sudah menciderai rasa keadilan dan merupakan pelanggaran serius.”* Hal ini menunjukkan bahwa beberapa orang yang mengatasnamakan Forum Anti Penistaan Agama, mendatangi pelayanan kepolisian Polda Metro Jaya untuk melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Terkait pernyataannya melakukan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok saat menghadiri pertemuan dengan warga di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Penggalan kalimat presenter ini menunjukkan bahwa beberapa element masyarakat sudah terpengaruh dengan berita yang bermula dari pidato Ahok di

Kepulauan Seribu tersebut. Hal ini merupakan dimensi sosial-budaya Fairclough (Eriyanto, 2001: 294) yang sejalan dengan subjudul yang pertama (OSJ_1.1) *'Ahok dinilai menyinggung umat Islam'*. Demikian pula dengan OKP_1.3 yakni *"Anggota komnas HAM M. Nur Khoiron meminta masyarakat tidak membesar-besarkan pernyataan Ahok, apalagi dikaitkan dengan pilkada Jakarta yang akan segera berlangsung. Sementara pengurus besar Nahdlotul Ulama/ PBNU akan mendengarkan Ahok terkait pernyataannya."* Presenter menginginkan masyarakat untuk tidak membesar-besarkan pernyataan Ahok, seperti yang diutarakan oleh narasumber yang ditampilkan. Apalagi dikaitkan dengan pilkada Jakarta yang akan segera berlangsung. Hal ini merupakan dimensi sosial-budaya Fairclough (Eriyanto, 2001: 294) sejalan dengan pernyataan pada subjudul yang kedua OSJ_1.2 yakni *'Hindari Isu Sara dalam Pilkada'*. Subjudul yang dipakai oleh TVOne nampaknya sudah disesuaikan dengan apa yang ingin disampaikan oleh presenter.

Beberapa uraian tersebut menyatakan bahwa pola pemberitaan pada TVOne untuk OT_1 ini menggunakan piramida terbalik. Hal ini terlihat bahwa pemberitaan TVOne untuk OT_1 ini menjelaskan penyajian informasi secara berurutan dengan mengedepankan atau memprioritaskan fakta-fakta penting. Konsep penyajian informasi langsung ke dalam pokok persoalan (Badara, 2013: 23).

b. Pola Pemberitaan MetroTV

Tanggal 8 Oktober 2016 *breaking news* MetroTV memberitakan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan

mengambil tema (MT_1) *'Pelaporan kasus penistaan agama'*. Pola pemberitaan yang pertama yakni *summary* (ringkasan) yang terdiri dari judul dan subjudul yang saling berkaitan (Van Dijk, 1988:52). MT_1 diwakili dengan judul *'Isu Penistaan Kitab Suci'*. Judul tersebut mempunyai dua subjudul yang keduanya saling berhubungan dalam sebuah berita. Subjudul yang pertama (MSJ_1.1) *'Dituding Menistakan Agama'* nampaknya dapat mewakili apa yang tersirat dalam judul yakni tudingan menistakan agama hanyalah sebuah isu. Subjudul yang kedua (MSJ_1.2) yakni *'Salah Presepsi karena Video Dipotong'* yang merupakan penjelas dari judul bahwa karena salah persepsi inilah mengakibatkan munculnya isu tersebut. Dari tema, judul, sampai dengan subjudul yang dipakai untuk menarik pemirsa pada pemberitaan saling berkaitan satu sama lain.

Pola pemberitaan berikutnya terlihat pada isi berita. Katagori berita yang terdapat pada isi pemberitaan pertama adalah peristiwa utama yang mengandung informasi utama sehubungan dengan topik yaitu situasi aktual dan peristiwa konkret (Van Dijk, 1988:70). Isi pemberitaan MetroTV pada MT_1 ini adalah MI_1 yakni *"Gubernur Basuki Cahya Purnama membantah menistakan kitab suci Alquran. Ahok menilai ada salah presepsi karena video yang beredar sudah dipotong. Bantahan ini menanggapi laporan pemuda Forum Anti Penistaan Agama ke polisi."* Hal ini menunjukkan bahwa Ahok membantah jika melakukan penistaan agama, ia juga menyatakan bahwa ada unsur kesengajaan karena video telah dipotong. Pernyataan pada MI_1 merupakan pokok penyampaian dari subjudul yang digunakan oleh MetroTV.

Kalimat terakhir pada MI_1 inilah yang nampaknya menjadi penekanan untuk dijadikan subjudul pada MSJ_1.2.

Pada pola pemberitaan berikutnya nampak pada reaksi verbal narasumber yang merupakan sebuah katagori skema berita yang bersifat lebih khusus yang mungkin tampak sebagai *consequense* (Van Dijk, 1988:60). Peristiwa berita yang paling penting biasanya diikuti oleh reaksi verbal partisipan/ aktor yang penting. Narasumber pertama yang ditampilkan MetroTV sebagai pendukung dari pernyataan-pernyataannya pada pemberitaan kasus ini (MRV_1.1) yakni Nusron Wahid (politisi Golkar). Ia menyatakan *“Fakta yang jelas, konteksnya juga jelas. Tidak ada sekatapun maupun e potongan katapun di situ yang mengatakan Ahok menistakan ataupun melecehkan Alquran itu tidak ada. Justru yang perlu kita cari adalah siapa orang yang sengaja memanggil dan kemudian mendiskripsikan itu. Yang perlu kita cari ini cara-cara yang tidak akhlaqul karimah, cara-cara yang tidak islami, dan cara-cara yang sengaja menggunakan ayat Alquran untuk menjatuhkan itu.”* Hal ini menunjukkan Nusron ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa tidak ada satu katapun -menurut Nusron- yang menunjukkan penistaan atau pelecehan terhadap Alquran. Ia juga menambahkan bahwa yang patut dicari adalah siapa yang mendeskripsikan dan orang yang sengaja menggunakan Alquran untuk menjatuhkan Ahok. Sesuai dengan dimensi kewacanaan Fairclough (Eriyanto, 2001: 291) dimana MetroTV sengaja menampilkan Nusron Wahid sebagai narasumber karena diketahui ia menjabat sebagai pengurus partai Golkar sekaligus sebagai ketua tim

pemenangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pilgub 2017.

Narasumber berikutnya (MRV_1.2) adalah Ahok. Ia sebagai terlapor menyatakan *“Saya mengatakan dari tahun 2003 berpolitik, saya menemukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak milih saya. Jadi ayat Alquran ada yang salah gak? Gak salah. Konteksnya bukan itu. Konteksnya jangan pilih Nasrani Yahudi jadi temenmu sahabatmu diterjemahkan asli jadi bilang saya menyampuri urusan agama. Saya sekolah islam SD SMP 9 tahun. Jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci dalam Alquran tidak maksudnya seperti itu, diplesetkan seperti itu.”* Pernyataan ini menunjukkan pembelaan Ahok tentang kasus yang menimpanya. Ia menunjukkan bahwa sejak tahun 2003 berpolitik, ia banyak menemukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat Alquran untuk membodohi orang agar tidak milihnya. MetroTV sengaja menampilkan Ahok dengan pernyataan Ahok sebagai pembelaannya atas pelaporan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Forum Anti Penistaan Agama tersebut. Kalimat pembelaannya adalah ketika ia menyatakan bahwa ayat Alquran tidak salah, tapi konteks yang digunakan bukan seperti yang orang anggap karena pada intinya Ahok menemukan banyak orang rasis yang ingin menjatuhkannya melalui ayat tersebut sesuai dengan dimensi kewacanaan Fairclough (Eriyanto, 2001: 291).

MetroTV nampaknya sengaja menghadirkan dua narasumber saja karena keduanya sangat berpengaruh dalam kasus ini. MetroTV telah

menghadirkan narasumber sesuai dengan kriteria yakni narasumber yang kredibel dan merupakan orang nomor satu pada bidangnya serta menguasai segala bentuk legitimasi dalam sebuah kasus (Badara, 2012: 51). Nampaknya MetroTV ingin menghadirkan kebenaran pada terlapor. Masyarakat dibentuk untuk sependapat dan membenarkan terlapor, karena dua narasumber yang ditampilkan adalah orang yang berhubungan erat dengan terlapor, bahkan MetroTV sengaja menghadirkan terlapor (Ahok) dengan pembelaannya mengenai kasus ini. Dimulai dari Nusron Wahid yang merupakan politisi Partai Golkar dan pelaku kasus yakni Basuki Tjahaja Purnama. Diketahui bahwa salah satu pendukung Ahok adalah Partai Golkar. Maka dari itu, MetroTV sengaja menghadirkan Nusron Wahid dengan pernyataannya yang dirasa memihak Ahok.

Kategori pola pemberitaan terakhir adalah *comment* yang memuat komentar, opini dan evaluasi wartawan atau media bersangkutan. Meskipun setiap penulis berita menyadari bahwa fakta dan opini tidak boleh tercampur di dalam berita, kategori comment sering muncul dalam berita (terkadang) secara tidak langsung (Van Dijk, 1988:67). Metro ingin menghadirkan ideologi profesional/ objektivitas yang merupakan standart profesional berhubungan dengan jaminan yang ditekankan pada khalayak bahwa yang ditekankan adalah suatu kebenaran (Bungin, 2008: 199). Komentar presenter di awal pembuka berita MKP_1.1 yakni tanggapan presenter yang menyatakan “*Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Anti Penistaan Agama melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok ke Polda Metro Jaya. Ahok dituding menistakan agama karena komentarnya mengenai surat Al-Maidah.*

Menanggapi laporan tersebut, politisi partai Golkar Nusron Wahid menyatakan video pernyataan Ahok yang beredar sengaja dipotong, sehingga memunculkan salah pengertian di masyarakat.” Hal ini menunjukkan bahwa presenter ingin menampilkan kepada masyarakat jika Ahok dituding menistakan agama karena komentarnya mengenai surat Al-Maidah. Hal ini merupakan dimensi sosial-budaya Fairclough (Eriyanto, 2001: 294) yang sejalan dengan MSJ_1.1 yakni ‘Dituding Menistakan Agama’. Demikian pula dengan MKP_1.2 bahwa “Video pernyataan Ahok yang dilontarkan saat mengunjungi kepulauan Seribu telah diunggah secara utuh ke situs berbagi youtube. Ahok mempersilahkan semua pihak melihat secara utuh agar tidak salah persepsi.” Pada MKP_1.2 ini, presenter ingin meyakinkan kepada masyarakat atas pernyataannya dengan menampilkan Ahok yang mempersilahkan kepada siapapun untuk melihat secara utuh video yang sudah diunggah di youtube agar tidak terjadi salah persepsi. Hal ini merupakan dimensi sosial-budaya Fairclough (Eriyanto, 2001: 294) yang sejalan dengan MSJ_1.2 bahwa ‘Salah Persepsi karena Video Dipotong’.

Beberapa uraian tersebut menyatakan bahwa pola pemberitaan pada MetroTV untuk MT_1 ini menggunakan piramida terbalik. Hal ini terlihat bahwa pemberitaan MetroTV untuk MT_1 ini menjelaskan penyajian informasi secara berurutan dengan mengedepankan atau memprioritaskan fakta-fakta penting. Konsep penyajian informasi langsung ke dalam pokok persoalan (Badara, 2013: 23).

2.) **Pelaporan Buni Yani**

Merupakan tema salah satu pemberitaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama tertanggal 10 November 2016. Dalam tema ini, Buni Yani merupakan pengunggah video Ahok. Dari unggahan tersebut, sehingga kasus penistaan agama ini muncul.

a. Pola Pemberitaan TVOne

Tanggal 10 November 2016 berita terkini TVOne kembali memberitakan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan mengambil tema (OT_2) '*Pelaporan Buni Yani*'. OT_2 merupakan kelanjutan dari kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok dengan melibatkan Buni Yani sebagai pengunggah video tersebut. Pola pemberitaan yang pertama yakni *summary* (ringkasan) yang terdiri dari judul dan subjudul yang saling berkaitan (Van Dijk, 1988:52). OT_2 diwakili dengan judul '*Buni Yani Ditetapkan sebagai Tersangka*'. Judul tersebut mempunyai dua subjudul yang keduanya saling berhubungan dalam sebuah berita. Subjudul yang pertama (OSJ_2.1) '*Tetapkan Buni jadi Tersangka*' nampaknya memiliki kesamaan susunan kalimat dengan judul, sehingga maknanya pun sama. Subjudul yang kedua (OSJ_2.2) yakni '*Polisi Miliki 4 Bukti untuk Tetapkan Buni jadi Tersangka*' yang merupakan penjelas dari judul dan subjudul sebelumnya serta merupakan gambaran dari yang diberitakan yang berupa jawaban dari Buni ditetapkan menjadi tersangka. Dari tema, judul, sampai dengan subjudul yang dipakai untuk menarik pemirsa pada pemberitaan saling berkaitan satu sama lain.

Pola pemberitaan berikutnya terlihat pada isi berita. Katagori berita yang terdapat pada isi pemberitaan pertama adalah peristiwa utama yang mengandung informasi utama sehubungan dengan topik yaitu situasi aktual dan peristiwa konkret (Van Dijk, 1988:70). Isi pemberitaan TVOne pada OT_2 ini adalah OI_2 yakni *“Polisi menetapkan Buni Yani yang mengunggah video Ahok sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan”*. Pernyataan pada OI_2 merupakan pokok penyampaian dari judul yang digunakan oleh TVOne. Kalimat penjelas pada akhir OI_2 inilah yang nampaknya menjadi penjelas dari judul yang digunakan.

Pada pola pemberitaan berikutnya nampak pada reaksi verbal narasumber yang merupakan sebuah katagori skema berita yang bersifat lebih khusus yang mungkin tampak sebagai *consequense* (Van Dijk, 1988:60). Peristiwa berita yang paling penting biasanya diikuti oleh reaksi verbal partisipan/ aktor yang penting. Narasumber pertama yang ditampilkan TVOne sebagai pendukung dari pernyataan-pernyataannya pada pemberitaan kasus ini (ORV_2.1) yakni Kombes Awi Setiyono. Ia menyatakan *“Kita sudah memeriksa dari 5 alat bukti sudah memenuhi 4 alat bukti mulai dari: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; dan terakhir petunjuk. Itu sudah kita kantong. Kita naikkan saksi sebagai tersangka karena memang unsur-unsurnya sudah terpenuhi, untuk bukti yang seperti itu sudah terpenuhi.”* Hal ini menunjukkan bahwa polisi sudah memeriksa lima alat bukti dan empat diantaranya sudah memenuhi syarat, sehingga status saksi dinaikkan menjadi status tersangka. Kombes Awi Setiyono adalah perwira polri yang menangani kasus Ahok yang melibatkan Buni Yani sebagai

pengunggah video. Karena itu, sesuai dengan dimensi kewacanaan Fairclough (Eriyanto, 2001: 291), TVOne nampaknya ingin secara langsung menunjukkan pernyataan-pernyataan dari orang yang menangani kasus ini.

Narasumber yang kedua (ORV_2.2) yakni Buni Yani sebagai tersangka. Ia menyatakan *“Ketika terjadi diskusi, lalu kemudian menemukan ada satu kata yang hilang yaitu kata ‘pakai’ dalam transkrip saya. ‘dibohongi pakai surat Almaidah’ seharusnya, tapi dalam transkrip saya itu tidak ada kata pakainya. Ketika saya dengar ada kata ‘pakai’ dalam videonya, langsung saya bilang langsung saya mengaku ‘betul’. Itu memang ada kata ‘pakai’ saya minta maaf, saya gak berani, saya minta maaf. sekali saya berbohong, orang tidak akan percaya saya seterusnya, makanya langsung saya bilang itu.”* Hal ini menunjukkan bahwa saat pemeriksaan terhadap Buni berlangsung, ditemukan bahwa pada video pidato yang diunggah Buni terdapat kata ‘pakai’, sedangkan dalam transkripnya tidak menggunakan itu meskipun menurut Buni dengan atau tanpa kata ‘pakai’ itu makna dalam kalimat tersebut tidak berubah. Sehingga ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada publik. Sesuai dengan dimensi kewacanaan Fairclough (Eriyanto, 2001: 291), pemberitaan pada tema ini sengaja menghadirkan Buni yang berstatus sebagai tersangka untuk menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga menjadikannya sebagai tersangka.

Kedua narasumber yang digunakan untuk mendukung pemberitaan di TVOne untuk OT_2 ini merupakan orang-orang yang dipilih langsung sesuai dengan point pemberitaan yang ingin disampaikan. TVOne telah menghadirkan narasumber sesuai dengan kriteria yakni narasumber yang kredibel dan

merupakan orang nomor satu pada bidangnya serta menguasai segala bentuk legitimasi dalam sebuah kasus (Badara, 2012: 51). Pada pemberitaan ini, TVOne nampaknya ingin menghadirkan orang-orang yang berpihak pada tersangka (Buni). Pemberitaan TVOne untuk kasus ini ingin menghadirkan kebenaran pada tersangka. Masyarakat dibentuk untuk sependapat dan membenarkan tersangka, Narasumber pertama diambil dari kepolisian dengan pernyataannya bahwa telah melakukan pemeriksaan. Narasumber kedua yakni Buni Yani sebagai pelaku dalam kasus ini dengan pernyataan pembelaannya. Kalimat-kalimat yang diperhalus oleh tersangka menunjukkan bahwa tersangka menginginkan masyarakat berbaik sangka padanya.

Kategori pola pemberitaan terakhir adalah *comment* yang memuat komentar, opini dan evaluasi wartawan atau media bersangkutan. Meskipun setiap penulis berita menyadari bahwa fakta dan opini tidak boleh tercampur di dalam berita, kategori comment sering muncul dalam berita (terkadang) secara tidak langsung (Van Dijk, 1988:67). TVOne ingin menghadirkan ideologi profesional/ objektivitas yang merupakan standart profesional berhubungan dengan jaminan yang ditekankan pada khalayak bahwa yang ditekankan adalah suatu kebenaran (Bungin, 2008: 199). Komentar presenter di awal pembuka berita (OKP_2.1) yakni *“Setelah sempat menjalani pemeriksaan sebagai terlapor kurang lebih sembilan jam, polisi langsung menetapkan Buni Yani yang mengunggah video Ahok ke media sosial sebagai tersangka dalam kasus penghasutan isu sara. Polisi mengatakan, penetapan Buni didasari atas empat alat bukti yang sudah dimiliki.”* Presenter ingin menampilkan bahwa setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 9 jam, polisi menetapkan Buni Yani

pengunggah video Ahok sebagai tersangka dalam kasus penghasutan isu sara. Hal ini merupakan dimensi sosial-budaya Fairclough (Eriyanto, 2001: 294) yang sejalan dengan subjudul yang pertama (OSJ_2.1) *'Tetapkan Buni jadi Tersangka'*. Demikian pula dengan OKP_2.2 yakni *"Buni Yani yang sebelumnya dilaporkan oleh komunitas muda Advokad Ahok-Jarot dengan tuduhan sengaja menambahkan kalimat provokatif dalam video pidato Ahok di Kepulauan Seribu dan mengunggah ke akun media sosial facebook. Dalam laporannya, mereka menuding Buni sengaja mentranskrip tidak lengkap pada rekaman video tersebut. Dalam sebuah kesempatan, Buni mengaku memang tidak menulis lengkap pada transkripnya. Namun, menurutnya makna yang terkandung dalam video tersebut tetap sama."* Menyatakan bahwa anggota advokad Ahok-Jarot melaporkan Buni Yani ke pihak berwajib karena telah mengunggah video pidato beserta transkrip yang tidak lengkap ke media sosial facebook, dan OKP_2.3 *"Polisi terus memeriksa kasus Buni sebagai tersangka. Kasus hukum yang telah berjalan, kini menjadi sorotan publik."* menyatakan bahwa kasus Buni sebagai tersangka masih terus diperiksa oleh polisi. keduanya merupakan dimensi sosial-budaya Fairclough (Eriyanto, 2001: 294) yang juga sejalan dengan pernyataan pada subjudul yang kedua OSJ_2.2 *'Polisi Miliki 4 Bukti untuk Tetapkan Buni jadi Tersangka'*. Subjudul yang dipakai oleh TVOne nampaknya sudah disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh presenter.

Beberapa uraian tentang pola pemberitaan di TVOne menyatakan bahwa dalam pemberitaan ini, TVOne tidak menggunakan piramida terbalik, melainkan menggunakan pola pemberitaan dengan struktur piramida. Berita

yang berstruktur seperti piramida, diawali dengan yang kurang penting menuju ke yang paling penting. Umumnya, berita dengan struktur piramida merupakan berita ringan dan *human interest* yang tidak memiliki nilai berita yang tinggi, tetapi menarik (Badara, 2013: 24).

b. Pola Pemberitaan MetroTV

Tanggal 7 November 2016 *breaking news* MetroTV kembali memberitakan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan mengambil tema (MT_2) 'Pelaporan Buni Yani'. Pola pemberitaan yang pertama yakni *summary* (ringkasan) yang terdiri dari judul dan subjudul yang saling berkaitan (Van Dijk, 1988:52). MT_2 diwakili dengan judul '*Dugaan Provokasi di Media Sosial*'. Judul tersebut mempunyai dua subjudul yang keduanya saling berhubungan dalam sebuah berita. Subjudul yang pertama (MSJ_2.1) '*Polisi Telusuri Dugaan Pelanggaran Hukum Buni*' nampaknya mempunyai maksud yang sama, namun pemilihan kalimatnya saja yang berbeda. Pada judul menggunakan kalimat '*provokasi di media sosial*' yang dikhususkan dengan kalimat '*dugaan pelanggaran hukum*' pada subjudul. Subjudul yang kedua (MSJ_2.2) yakni '*Dugaan Provokasi di Media Sosial*' yang sama persis dengan judul. Dari tema, judul, sampai dengan subjudul yang dipakai untuk menarik penonton dan saling berkaitan satu sama lain.

Pada pola pemberitaan berikutnya nampak pada reaksi verbal narasumber yang merupakan sebuah katagori skema berita yang bersifat lebih khusus yang mungkin tampak sebagai *consequense* (Van Dijk, 1988:60). Peristiwa berita yang paling penting biasanya diikuti oleh reaksi verbal

partisipan/ aktor yang penting. Narasumber pertama yang ditampilkan MetroTV sebagai pendukung dari pernyataan-pernyataannya pada pemberitaan kasus ini (MRV_2.1) adalah Irjen Polisi Boy Rafli Amar (Kadip Humas Mabes Polri) yang menyatakan *“Dengan upload yang dilakukan dan penyebarluaskan bahwa di sosial media kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang viral dan kemudian menjadi bahan publik, kita hanya ingin meligit apakah disitu ada pelanggaran hukum atau tidak, itu saja oleh penyelidikny kita tidak mau kemana-mana.”* Hal ini menunjukkan bahwa penyelidik hanya akan melihat apakah ada pelanggaran dalam peng-*upload*-an dan penyebarluasan di media sosial yang menjadi viral tersebut. MRV_2.1 menghadirkan Kadip Humas Mabes Polri dengan pernyataannya tentang tindak lanjut kepolisian mengenai kasus tersebut untuk memperlihatkan keseriusan polri dalam menangani kasus sesuai dengan dimensi kewacanaan Fairclough (Eriyanto, 2001: 291).

Narasumber kedua (MRV_2.2) menghadirkan Buni Yani sebagai tersangka. Ia menyatakan *“Saya bersumpah demi Allah tidak mengubah apa2 di dalam video tersebut, sama sekali tidak karena pa, karena saya tahu itu adalah fitnah, saya membaca undang2 ITE, saya membaca undang2 pers, saya membaca undang2 tentang openyiaran.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Buni benar-benar tidak mengubah apapun dalam video. Ia berani bersumpah demi Allah karena ia telah membaca UU ITE dan pers tentang penyiaran. MRV_2.2 menampilkan Buni dengan sumpahnya untuk meyakinkan pada pemirsa bahwa apa yang dia lakukan tidak seperti apa yang

dituduhkan sesuai dengan dimensi kewacanaan Fairclough (Eriyanto, 2001: 291).

Narasumber terakhir MRV_2.3 yang ditampilkan adalah Taufiqulhadi anggota komisi III DPR yang menyatakan *“Jika mau melakukan penegakan hukum, menerapkan hukum, ya Terhadap seseorang maka apabila terkait dengan orang lain, orang lain itu harus diperlakukan sama juga. Ya semuanya, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya menurut saya, karena itu adalah siapapun yang terkait dengan itu, menurut saya harus diproses dilihat, karena itu saling terkait nantinya karena kalau tidak, tidak kita temukan e keadilan karena kenapa ada mata rantai yang terputus.”* Hal ini menunjukkan bahwa komisi III DPR menginginkan penerapan dan penegakan hukum harus diaplikasikan, maka semua kasus harus diperlakukan sama. Pemeriksaan harus sesuai prosedur yakni dilihat bukti-buktinya terlebih dahulu sehingga tidak ada mata rantai yang terputus. MRV_2.3 sengaja menampilkan komisi III DPR dengan harapan-harapan yang ingin dicapai dalam kasus yang melibatkan Buni tersebut sesuai dengan dimensi kewacanaan Fairclough (Eriyanto, 2001: 291).

Ketiga narasumber yang digunakan untuk mendukung pemberitaan di MetroTV untuk MT_2 ini merupakan orang-orang yang dipilih langsung sesuai dengan point pemberitaan yang ingin disampaikan. MetroTV telah menghadirkan narasumber sesuai dengan kriteria yakni narasumber yang kredibel dan merupakan orang nomor satu pada bidangnya serta menguasai segala bentuk legitimasi dalam sebuah kasus (Badara, 2012: 51). MetroTV nampaknya ingin membentuk masyarakat agar berpihak pada pelapor, hal ini

terlihat pada narasumber pertama yang dimulai dari Kadip Humas Mabes Polri yang akan menyelidiki kasus Buni ini. Selanjutnya ditampilkan Buni yang meyakinkan masyarakat bahwa dia tidak bersalah dengan sumpah-sumpahannya. Namun, pada narasumber yang terakhir ditampilkan komisi III DPR dengan desakannya pada pihak berwajib untuk menegakkan hukum. Dilihat dari pernyataan komisi III DPR yang mendesak pihak kepolisian, sehingga nampak bahwa MetroTV menginginkan masyarakat juga berpihak untuk memproses hukum sampai tuntas.

Kategori pola pemberitaan terakhir adalah *comment* yang memuat komentar, opini dan evaluasi wartawan atau media bersangkutan. Meskipun setiap penulis berita menyadari bahwa fakta dan opini tidak boleh tercampur di dalam berita, kategori comment sering muncul dalam berita (terkadang) secara tidak langsung (Van Dijk, 1988:67). MetroTV ingin menghadirkan ideologi profesional/ objektivitas yang merupakan standart profesional berhubungan dengan jaminan yang ditekankan pada khalayak bahwa yang ditekankan adalah suatu kebenaran (Bungin, 2008: 199). Komentar presenter di awal pembuka berita MKP_2.1 yakni *“Buni Yani, pengunggah cuplikan video dugaan penistaan agama oleh calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan segera diperiksa polisi. Meski Buni Yani telah mengaku sebagai pengupload video tersebut, namun polisi menganggap Buni sebagai salah satu pemicu kontroversi di tengah masyarakat yang yang berujung demonstrasi 4 nov lalu. Menurut kepala divisi humas mabes polri irjen boy rafli amar, buni yani berpotensi menjadi tersangka karena video unggahannya di media sosial dan memicu kegaduhan di publik.”* Hal ini menunjukkan bahwa presenter

menginginkan masyarakat tahu bahwa polisi menganggap Buni sebagai salah satu pemicu kontroversi di masyarakat karena video yang telah ia unggah di media sosial dan berujung demonstrasi pada 4 November. Sehingga menurut polisi, Buni berpotensi menjadi tersangka. Hal ini merupakan dimensi sosial-budaya Fairclough (Eriyanto, 2001: 294) yang sejalan dengan MSJ_2.1 bahwa *'Polisi Telusuri Dugaan Pelanggaran Hukum Buni'* dan MSJ_2.2 yakni *'Dugaan Provokasi di Media Sosial.'* Sedangkan MKP_2.2 *"Atas tuduhan tersebut, buni yani membantah apa yang disudutkan padanya terkait videop yang tersebar di media sosial, Buni hanya mengupload video yang sudah diupload sebelumnya oleh akun yang bernama NKRI. Apa yang dituliskan Buni dalam akun sosial media facebook sama dengan apa yang telah disampaikan Ahok saat berkunjung di kepulauan seribu."* Menunjukkan bahwa presenter menghadirkan bantahan Buni atas apa yang dituduhkan. Ia hanya meng-upload video yang sudah *diupload* sebelumnya oleh akun NKRI. Dan apa yang ditulis Buni sama dengan apa yang dikatakan oleh Ahok saat berkunjung di Kepulauan Seribu. Hal ini juga merupakan dimensi sosial-budaya Fairclough (Eriyanto, 2001: 294) yang sejalan dengan MSJ_2.3 bahwa *'Buni Upload Video Sesuai dengan Sebelumnya'*. Dan terakhir MKP_2.3 *"Dukungan untuk memproses hukum Buni Yani juga muncul di dunia maya, petisi daring yang diinisiasi paguyuban diskusi di situs [change.org](https://www.change.org) hingga senin 7 nov telah ditanda tangani lebih dari 130 ribu netizen, atas kasus ini buni yani yang terancam dikenakan UU ITE pasal 28 dan pasal 45 ayat 2 dengan ancamanpidamna paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 milyar rupiah."* Presenter menunjukkan bahwa Dukungan untuk memproses hukum

Buni muncul di dunia maya, petisi daring di situs change.org telah mengumpulkan 130 tanda tangan dari netizen. Dan buni terancam dikenakan UU ITE pasal 28 dan pasal 45 ayat 2 dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda 1 milyar rupiah. Selain itu, MKP_2.4 yang menyatakan "*Anggota komisi 3 DPR Taufiqul Hadi menyatakan polisi harus mengusut unsur pidana pada kasus Buni Yani. Menurut Taufiq sangkaan penodaan agama atas Ahok berkaitan dengan transkrip Buni Yani yang menghilangkan kata 'pakai' dalam video rekaman Ahok yang ia unggah di media sosial.*" menunjukkan bahwa anggota komisi III DPR menyatakan bahwa polisi harus mengusut tuntas unsur pidana yang dilakukan oleh Buni. Kasus tersebut berkaitan dengan transkrip Buni yang menghilangkan kata 'pakai' dalam video rekaman Ahok yang diunggahnya. Keduanya merupakan dimensi sosial-budaya Fairclough (Eriyanto, 2001: 294) juga menjelaskan MSJ_2.4 yang menyatakan bahwa '*Proses Hukum Buni Yani*'.

Beberapa uraian tersebut menyatakan bahwa pola pemberitaan pada MetroTV untuk MT_2 ini menggunakan piramida terbalik. Hal ini terlihat bahwa pemberitaan MetroTV untuk MT_2 ini menjelaskan penyajian informasi secara berurutan dengan mengedepankan atau memprioritaskan fakta-fakta penting. Konsep penyajian informasi langsung ke dalam pokok persoalan (Badara, 2013: 23).

Uraian pola pemberitaan dari stasiun televisi TVOne dan MetroTV menunjukkan bahwa masing-masing stasiun televisi mempunyai strategi untuk menyampaikan ideologinya melalui pemberitaan yang disampaikan. Dengan strategi yang dipakai dalam pemberitaan, akan lebih mudah membentuk

ideologi di masyarakat (Darma, 2014:190). Terlihat dari perbedaan pola pemberitaan pada dua stasiun yakni TVOne dan MetroTV. Dari dua tema pemberitaan, TVOne menggunakan pola pemberitaan piramida terbalik hanya pada OT_1, sedangkan pada OT_2 menggunakan pola pemberitaan piramida. Berbeda dengan MetroTV yang menggunakan piramida terbalik untuk kedua tema berita yang disampaikan. Piramida terbalik sendiri merupakan konsep penyajian informasi langsung ke dalam pokok persoalan (Badara, 2013: 23). TVOne menggunakan piramida terbalik hanya pada OT_1 karena TVOne ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa berita pada OT_1 ini merupakan berita penting dan butuh perhatian masyarakat. Berbeda dengan MetroTV yang menganggap berita pada kedua tema tersebut merupakan berita yang berat dan butuh perhatian lebih dari masyarakat.

Perbedaan selanjutnya terlihat dari pemilihan narasumber pada masing-masing pemberitaan. Sumber penting untuk mengembangkan sebuah cerita dalam memberikan makna dan kedalaman suatu peristiwa atau keadaan dalam sebuah pemberitaan bergantung pada narasumber (Badara, 2012: 55). Pemilihan narasumber pada TVOne lebih bervariasi dan lebih banyak menghadirkan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan kasus yang disampaikan. Narasumber pada OT_1 merupakan orang-orang yang pro pada pelapor, sehingga menunjukkan bahwa pihak TVOne juga pro dengan pelapor. Sama halnya dengan OT_2 yang hanya menghadirkan dua narasumber saja. Namun, dari dua narasumber pemberitaan ini sama-sama pro pada terlapor. Dari OT_1 dan OT_2, TVOne nampak ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kasus-kasus yang sedang bergulir dan ramai diperbincangkan masyarakat harus

dikaji dari sisi yang berbeda, yakni dari sisi yang terdeskriminasi dan tidak mempunyai kekuasaan. Berbeda dengan MetroTV hanya menghadirkan dua narasumber pada MT_1 yang salah satunya merupakan orang yang pro dengan terlapor dan satunya lagi adalah terlapor sendiri dengan pembelaannya tentang kasus yang menimpanya, sehingga terkesan MetroTV pro dengan terlapor. Sedangkan pada MT_2, narasumber yang dihadirkan merupakan orang-orang yang memberatkan terlapor, sehingga nampak diskriminasi yang disuguhkan oleh MetroTV bahwa kekuasaan pasti benar.

2. Strategi Wacana

Merupakan cara yang digunakan oleh media massa untuk menyampaikan ideologi kepada masyarakat melalui berita. Dengan strategi yang dipakai dalam pemberitaan di media massa, akan lebih mudah membentuk ideologi di masyarakat. Ada beberapa bentuk atau sifat teks yang dapat dianalisis dalam membongkar makna melalui dimensi tekstual yang meliputi kohesi dan koherensi (leksikal, repetisi, sinonim, antonim, konjungsi, dan pronomina); tata bahasa berupa klausa aktif dan pasif; dan diksi yang merupakan analisis wacana kritis dimensi tekstual (Norman Fairclough dalam Eriyanto, 2001: 286). Strategi wacana juga dapat melalui pendekatan tokoh yang dapat dilihat dari inklusi dan eksklusi tokoh (Leeuwen, 2008:23-54)

1.) Pelaporan kasus penistaan agama

a. Strategi Wacana TVOne

Judul tayangan '*Geger Pernyataan Ahok*' pada OT_1 menggunakan kata 'geger' diperkirakan untuk menarik perhatian pemirsa. Kata ini bermakna 'riuh ramai tidak keruan; gempar; heboh; dan ribut' (KBBI, 2016) sehingga

judul ini memperkuat adanya peristiwa yaitu pernyataan Ahok yang membuat gempar masyarakat. Kegemparan ini diperjelas dengan sub judul tayangan, yaitu *'Ahok dinilai menyinggung umat Islam'* (OSJ_1). Kata *'dinilai'* merupakan bentuk pasif yang menitikberatkan pada pelaku atau objek yang berubah kedudukan sebagai subjek yakni Ahok, dengan demikian Ahok dianggap sebagai pihak yang bersalah yang membuat *'geger'*.

Strategi bahasa yang ditemukan pada pemberitaan di TVOne juga terlihat pada bentuk repetisi, yaitu pengulangan kata, frasa dan klausa yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Keraf, 2007: 127). Sebagai contoh frasa *'dugaan penistaan agama'* diulang sebanyak 3 kali, meskipun terdapat kata *'dugaan'* namun frasa *'penistaan agama'* seakan-akan menggiring pemirsa bahwa *'penistaan agama'* itu mungkin ada. Demikian halnya dengan kata *'Pernyataan'* yang diulang sebanyak 6 kali dan kata *'Menyinggung'* sebanyak empat kali. Meskipun kata *'pernyataan'* diulang lebih banyak dari pada kata *'menyinggung'* namun dua kata tersebut saling berkaitan dan pengulangan ini sebagai penekanan bahwa pernyataan tersebut menyinggung perasaan orang banyak. Bentuk repetisi lain yang ditemukan dalam pemberitaan ini ialah penyebutan nama. Penggunaan nama *'Ahok'* disini cukup dominan hingga 11 kali dibandingkan dengan penyebutan nama lengkap atau jabatannya *'Basuki Tjahja Purnama'* yang hanya disebutkan sebanyak 3 kali, sehingga kedudukan Ahok sebagai pihak yang dianggap bersalah terasa sekali. Masyarakat akan sangat familiar dengan nama Ahok daripada Basuki, sehingga ketika *'Ahok'* berulang-ulang disebut maka akan timbul penekanan pada pelaku.

Dalam strategi pemberitaan tentang kasus ini, ditemukan strategi inklusi (menghadirkan aktor dalam teks), dimana Ahok sebagai aktor yang dimarjinalkan dihadirkan sebagai sudut pandang utama). Selain itu strategi eksklusi atau penghilangan pelaku dalam pemberitaan juga ditemukan. Eksklusi ini ditemukan pada kalimat-kalimat pasif, karena dalam kalimat pasif yang terlihat hanyalah korban (Van Leeuwen, 2008:31-54). Kalimat-kalimat tersebut ialah '*Basuki Tjahja Purnama dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama.*' dan '*Pernyataan Ahok dinilai telah menyinggung umat islam.*' Dua kalimat pasif tersebut tidak dilengkapi dengan objek, sehingga hanya nampak subjek yang dikenai pekerjaan. Siapa yang melaporkan dan siapa yang menilai pernyataan Ahok tidak disampaikan dalam kalimat tersebut, sehingga masyarakat hanya menekankan pada subjek yang dikenai pekerjaan.

b. Strategi Wacana MetroTV

Judul tayangan '*Isu Penistaan Kitab Suci*' pada MT_1 menggunakan kata '*isu*' yang diperkirakan akan menarik untuk dibahas. Kata tersebut bermakna masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dsb); kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya; kabar angin; desas-desus (KBBI, 2016). Sehingga judul ini memperkuat adanya peristiwa bahwa Gubernur Basuki Cahya Purnama membantah menistakan agama. Hal ini diperjelas dengan subjudul '*dituding menistakan agama*' (MSJ_1). Kata '*dituding*' pada MSJ_1 merupakan bentuk pasif tanpa ada subjek dan objek. Kata ini berkaitan dengan judul yang menggunakan kata '*isu*'. Karena sebuah berita yang belum jelas, maka seseorang dituding melakukan sesuatu. Subjudul yang kedua yakni '*salah presepsi karena video dipotong*' (MSJ_2). Frasa

'*karena video dipotong*' menjadi jawaban dari sebuah judul yang menggunakan kata '*isu*' tersebut.

Strategi bahasa yang ditemukan pada pemberitaan di MetroTV juga terlihat pada bentuk repetisi, yaitu pengulangan kata, frasa, dan klausa untuk tujuan penguatan atau penekanan kepada tema. Sebagai contoh kata '*menistakan*' yang diulang sebanyak 4 kali. Kata tersebut diulang-ulang dengan gabungan kata yang berbeda yaitu '*menistakan agama*' sebanyak 2 kali dan '*menistakan kitab suci*' 2 kali. Kata '*kitab suci*' yang diikutkan pada '*menistakan*' merupakan kata khusus dari agama, namun '*kitab suci*' pada pemberitaan ini juga dikhususkan lagi dengan menggunakan kata '*ayat Alquran*' yang diulang sebanyak 2 kali. Sehingga penggunaan kata '*agama*' yang dianggap terlalu umum kemudian lebih dikhususkan lagi pada '*ayat Alquran*' saja. Penggunaan nama '*Ahok*' di sini muncul 4 kali, namun sebelum menyebut nama '*Ahok*', gelar dan nama '*gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama*' disebutkan terlebih dahulu. Sehingga terlihat bahwa pelaku dalam pemberitaan ini adalah seorang yang mempunyai kedudukan no 1 di Ibu Kota.

2.) Pelaporan Buni Yani

a. Strategi Wacana TVOne

Judul tayangan '*Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka*' pada OT_2 menggunakan kata '*tersangka*'. Kata ini bermakna diduga; dicurigai; tertuduh; terdakwa (KBBI: 2016) sehingga dalam judul nampak bahwa dalam kasus yang diberitakan oleh TVOne, orang yang disalahkan adalah Buni. Kata '*ditetapkan*' berarti sudah dipastikan bahwa yang bersalah adalah Buni.

Kalimat pasif yang digunakan dalam judul merupakan salah satu strategi inklusi yang digunakan untuk menonjolkan korban dalam kalimat tersebut, yakni Buni. Penggunaan kalimat pasif berdampak pada pelaku karena dalam kalimat pasif yang terlihat hanyalah korban (Van Leeuwen, 2008:32). Objek dan keterangan kalimat pasif yang digunakan dalam judul baru disebutkan OI_2 dalam bentuk kalimat aktif 'Polisi menetapkan Buni Yani yang mengunggah video Ahok sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan'. '*Polisi*' merupakan objek dari kalimat pasif yang tidak disebutkan dalam judul '*Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka*' dan '*setelah menjalani pemeriksaan*' merupakan keterangan.

Strategi pemberitaan pada TVOne juga nampak pada repetisi beberapa kata yang digunakan. Penggunaan kata dasar '*tetap*' yang menjadi kata bentukan '*tetapkan, ketetapan, ditetapkan, menetapkan, dan penetapan*' diulang sebanyak 8 kali. Pengulangan ini sebagai penekanan dan kepastian dalam pemberitaan. Sejalan dengan kata '*tetap*', frasa '*sebagai tersangka*' pun mengalami pengulangan sebanyak 7 kali dalam pemberitaan kasus ini. Frasa ini merupakan kelanjutan dari kata '*tetap*'. Penekanan kepastian bahwa pelaku sebagai tersangka sangat nampak dari pengulangan kata dan frasa yang digunakan dalam pemberitaan tersebut. Repetisi selanjutnya terjadi pada kata '*pemeriksaan*'. Kata ini diulang sebanyak 5 kali. Pengulangan pada kata ini sebagai keterangan dari dua kata yang diulang sebelumnya yakni '*tetap*' dan '*tersangka*'. Kata '*pemeriksaan*' yang digunakan dalam pemberitaan ini bersinonim dengan kata '*berdiskusi*' yang digunakan oleh Buni ketika menanggapi pemberitaan ini. Buni mengganti kata '*pemeriksaan*' dengan kata

yang lebih halus yakni *'berdiskusi'* agar terkesan tidak terlalu membesar-besarkan kasus yang menyimpannya ini.

b. Strategi Wacana MetroTV

Judul tanyangan *'Dugaan Provokasi di Media Sosial'* dalam MT_2 menggunakan kata *'dugaan'* yang bermakna sangkaan; perkiraan (KBBI: 2016) sehingga dalam kasus yang diberitakan ini masih merupakan hal yang masih memerlukan kepastian berupa pemeriksaan lebih lanjut. Kata *'provokasi'* yang merupakan kelanjutan dari kata *'dugaan'* dan menjadi satu frasa berarti yang diduga adalah hal yang dilakukan oleh pelaku berupa perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan. Maksud kata *'provokasi'* pada judul ini kemudian dijelaskan pada MI_2 yakni video yang diedit kemudian diunggah dan menjadi kontroversi ditengah masyarakat. Dugaan provokasi yang digunakan dalam judul pemberitaan sejalan dengan MKP_2.1 berupa *'dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama'*. Terdapat persamaan makna dalam dua kalimat tersebut. Yakni karena apa yang menjadi kontroversi masih menjadi dugaan yang belum pasti, maka kasus penistaan agama juga masih merupakan dugaan yang belum pasti kebenarannya.

Strategi wacana dalam pemberitaan MetroTV juga nampak dari penggunaan kata *'dugaan'* yang diulang sebanyak 5 kali. Pengulangan kata ini sebagai penekanan bahwa kasus yang diberitakan dan kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus ini masih merupakan dugaan. Pengulangan kata *'upload'* juga mengalami pengulangan sebanyak 5 kali. Kata *'upload'* juga

digunakan dalam bentuk yang berbeda, yakni dengan menggunakan kata '*mengunggah*' yang merupakan makna kata '*upload*' itu sendiri. Kata '*unggah*' sendiri diulang lebih sedikit dari kata '*upload*' yakni hanya 3 kali pengulangan.

Terlihat dari uraian strategi wacana yang digunakan dalam pemberitaan di TVOne dan MetroTV mempunyai perbedaan. TVOne lebih banyak menggunakan repetisi atau pengulangan kata dalam penyampaian beritanya. Repetisi digunakan sebagai bentuk penekanan pada kata yang dianggap penting dalam sebuah konteks yang sesuai (Keraf, 2007: 127). Beberapa kata seperti '*menyinggung*' diulang sebanyak 6 kali pada OT_1, pengulangan terbanyak pada kata '*Ahok*' untuk menyebut tersangka pemberitaan pada OT_1, dan frasa '*sebagai tersangka*' diulang sebanyak 7 kali pada OT_2. Berbeda dengan MetroTV yang hanya menggunakan pengulangan sebanyak 4-5kali saja pada beberapa kata seperti '*menistakan*' sebanyak 4 kali pada MT_1 dan '*dugaan*' sebanyak 5 kali pada MT_2. Namun, MetroTV lebih banyak menggunakan kata ganti dengan menyertakan gelar dan kedudukan untuk menyebut tersangka pada MT_1. Gelar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disebut sebanyak 4 kali untuk menggantikan julukan Ahok dalam pemberitaannya. Dari pengulangan yang digunakan dalam pemberitaan pada kedua stasiun televisi ini nampak bahwa TVOne menginginkan masyarakat tahu bahwa dalam kasus yang diberitakan pada OT_1, Ahok sebagai tersangka karena perbuatannya menyinggung dan pada OT_2 menekankan pada Buni Yani sebagai tersangka. Sedangkan MetroTV menginginkan masyarakat masih menghormati tersangka karena merupakan orang nomor satu di DKI Jakarta pada MT_1 dan menunjukkan pada masyarakat bahwa dalang dibalik kasus

sang gubernur adalah Buni Yani yang harus diproses sesuai hukum yang ada pada MT_2.